

LAPORAN KINERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA TAHUN 2023



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR



Penyusunan "Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta Tahun 2023" merupakan wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran BPSIP DKI Jakarta yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya.

Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja BPSIP Jakarta selama tahun anggaran 2023. Tahun 2023 merupakan tahun perdana bagi BPSIP DKI Jakarta melaksanakan tugas fungsi yang baru, pasca disyahkannya pembentukan BSIP pada 21 September 2022.

Semoga Laporan Kinerja BPSIP DKI Jakarta Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, baik sebagai dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan maupun sebagai tolok ukur untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 29 Desember 2023
Kepala BPSIP DKI Jakarta

Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si.
NIP. 196807221994031003



Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di wilayah, BPSIP DKI Jakarta menjalankan tiga program kegiatan, yaitu program nilai tambah dan daya saing industri; program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; serta program dukungan manajemen. Yang menjadi target sasaran program BPSIP DKI Jakarta adalah: 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, dengan indikator sasaran jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, dengan indikator sasaran jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator sasaran nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPSIP DKI Jakarta; serta 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator sasaran nilai kinerja anggaran BPSIP DKI Jakarta.

Berdasarkan evaluasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP DKI Jakarta pada tahun anggaran 2023 telah memenuhi target tahunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2023.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan. Selain itu, mulai tahun 2024 Jakarta kemungkinan bukan lagi ibukota negara, dan ini membawa potensi perpindahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20%. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi yang dibutuhkan dalam skala global. Penerapan Standar di DKI Jakarta diterapkan untuk produk segar dan olahan (UMKM). Adapun kendala pelaku pertanian di Jakarta adalah a) sarana dan prasarana (keterbatasan lahan, kekurangan gudang, dan sarana pasca panen yang masih manual), b) sumber daya manusia (keterbatasan informasi tentang SNI, kurangnya kesadaran, dan administrasi yang lemah), c). produk (masih skala kecil, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta kendala biaya sertifikasi).

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka beberapa hal dapat dilakukan antara lain:

- 1) Jangka Pendek: Sosialisasi penerapan standar di komunitas pertanian, pemetaan mutu komoditas melalui optimalisasi pendampingan dan pelatihan penerapan standar;
- 2) Jangka Menengah: Penyusunan SOP penerapan standar komoditas, fasilitasi promosi dan pemasaran bagi yang menerapkan standar;
- 3) Jangka Panjang: Penerapan SNI pada produk segar dan olahan, memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang menerapkan standar, memberikan insentif kepada pelaku yang menerapkan standar

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai	1
II. Perencanaan Kinerja	5
2.1. Visi Kementerian Pertanian 2020-2024.....	5
2.2. Misi Kementerian Pertanian 2020-2024	6
2.3. Tujuan	6
2.4. Kegiatan.....	6
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
III. Akuntabilitas Kinerja	9
3.1. Capaian Kinerja.....	9
3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023	9
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2023.....	12
3.1.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	15
3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya	16
2.6. Akuntabilitas Keuangan	17
3.2.1. Realisasi Keuangan.....	17
3.2.2. Pengelolaan PNBPN	18
3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri.....	18
III. Penutup.....	19
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	19
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	19
Lampiran	21
Lampiran 1. Penetapan Kinerja BPSIP Jakarta TA 2023.....	22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan pegawai BPSIP Jakarta berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan tahun 2023	4
Tabel 2. Keadaan pegawai BPSIP Jakarta berdasarkan jenjang golongan dan jabatan tahun 2023	4
Tabel 3. Target capaian kinerja BPSIP Jakarta Tahun 2023	7
Tabel 4. Program dan anggaran BPSIP Jakarta TA 2023.....	8
Tabel 5. Capaian kinerja tahun 2023 BPSIP Jakarta	9
Tabel 7. Daftar SNI yang dimiliki BPSIP Jakarta.....	12

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sesuai peraturan penerapan akuntabilitas yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BSIP Kementan diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
2. Menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) pada setiap akhir tahun kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Kementan.

Atas dasar hal-hal di atas, BSIP Kementan sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2023 yang mencakup target seluruh Satker lingkup BSIP Kementan, salah satunya adalah Satker BPSIP DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam LAKIN BPSIP DKI Jakarta tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja BPSIP DKI Jakarta tahun 2023, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian meliputi:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

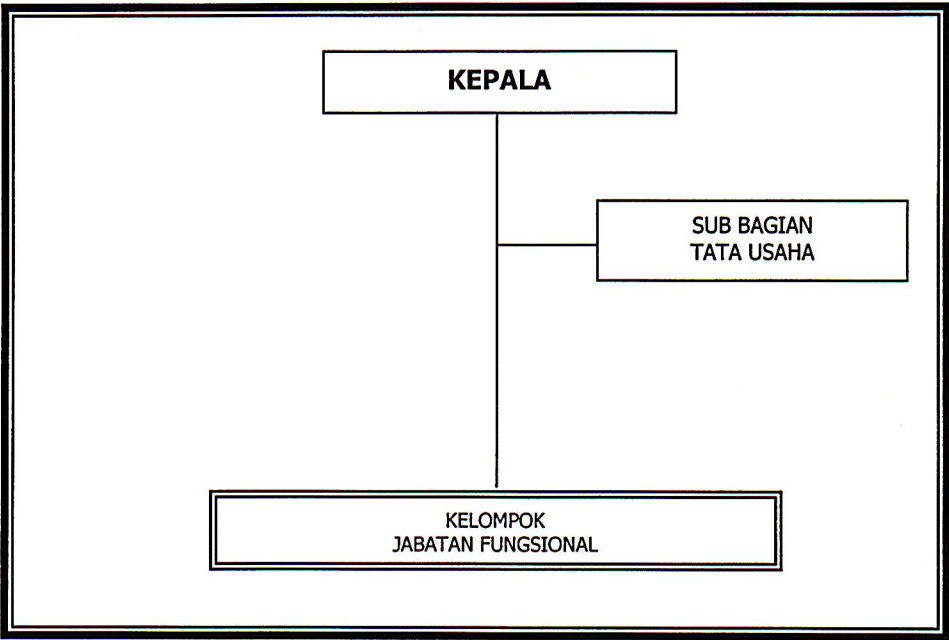
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai

Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) telah resmi lahir sebagai salah satu unit kerja baru di lingkungan

Kementerian Pertanian menggantikan Badan Litbang Pertanian. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) DKI Jakarta merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di DKI Jakarta dengan mandat mendukung penerapan dan diseminasi standar pertanian daerah/wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas pokok *"melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi"*. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPSIP Jakarta memiliki fungsi dalam hal:

- a. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP DKI Jakarta berkoordinasi dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Secara struktural, BPSIP DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Analis Standardisasi dan Penyuluh.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP DKI Jakarta TA 2023

Sumber kekuatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta diantaranya dalam hal dukungan sumberdaya manusia, baik kuantitasnya, maupun kualitas dan kinerjanya. Jumlah pegawai BPSIP DKI Jakarta pada akhir tahun 2023 sebanyak 31 orang PNS dan 1 tenaga PPPK pustakawan. Selain itu, BPSIP DKI Jakarta dibantu pula oleh 13 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 3 pengemudi, 4 satpam, 2 petugas kebersihan, serta 4 tenaga pramubakti. Keragaan pegawai BPSIP DKI Jakarta pada akhir tahun 2023 disajikan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Keadaan pegawai BPSIP DKI Jakarta berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan tahun 2023

Bidang Tugas	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	S3	S2	S1	SM	≤ SLTA	
Pejabat Struktural	1		1			2
Pejabat Fungsional:						
• Analis Standardisasi	1	8	1			10
• Penyuluh Pertanian		2	2			4
• Calon Peneliti		1				1
• Pustakawan			1			1
Analis Kepegawaian				1		1
Petugas Belajar			1			1
Administrasi			2	2	7	11
Jumlah	2	11	8	3	7	31

Tabel 2. Keadaan pegawai BPSIP DKI Jakarta berdasarkan jenjang golongan dan jabatan tahun 2023

Bidang Tugas	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pejabat Struktural			1	1	2
Pejabat Fungsional:					
• Analis Standardisasi			10		10
• Penyuluh Pertanian			3	1	4
• Calon Peneliti			1		1
• Pustakawan			1		1
Analis Kepegawaian		1			1
Petugas Belajar			1		1
Administrasi		5	6		11
Jumlah		6	23	2	31

Selain dukungan sumber daya manusia, dalam menjalankan Tupoksinya, BPSIP DKI Jakarta didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA BPSIP DKI Jakarta TA 2023 dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.288.702.000,- yang digunakan untuk membiayai program utama Balai yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp 605.200.000, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp 194.805.000, serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 4.488.697.000.

II. Perencanaan Kinerja

Terkait pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok dan fungsi seluruh UK/UPT BSIP mengacu pada Tusi BSIP yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, seperti tertuang dalam Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra BSIP DKI Jakarta 2023-2024 memuat perencanaan lima tahunan untuk mendukung arah dan sasaran strategis pembangunan pertanian.

Dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 Kementan, maka kebijakan BSIP diarahkan untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian, Strategi Operasional, serta Strategi Pendukung. Melalui Perpres 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, BSIP dibentuk untuk melaksanakan tugas standardisasi instrumen pertanian.

2.1. Visi Kementerian Pertanian 2020-2024

Mengacu pada visi Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan Kabinet Kerja yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka visi Kementerian Pertanian adalah:

"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Makna dari visi tersebut yaitu majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

2.2. Misi Kementerian Pertanian 2020-2024

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Makna yang dapat diambil dari misi tersebut dijabarkan sebagai berikut. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

2.4. Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP DKI Jakarta tahun 2020 – 2024 melaksanakan dua program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan satu Program Dukungan Manajemen. Sasaran kinerja dengan target output tahunan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2023, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sedang menjalani proses transisi kelembagaan sebagai dampak dari penarikan tupoksi penelitian dan pengembangan yang ada di kementerian/lembaga ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Di luar kegiatan dukungan manajemen, BPSIP Jakarta secara perdana

melaksanakan kegiatan teknis sesuai Tusi baru, diantaranya yaitu kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura; Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian; Taman Agro Standar; Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi DKI Jakarta; Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi; Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi; Laboratorium Terstandar; Perbenihan Padi di DKI Jakarta; serta Bimbingan Teknis Perbenihan di DKI Jakarta.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, BPSIP DKI Jakarta telah menetapkan target kinerja yang harus dicapai yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala BPSIP DKI Jakarta dengan Kepala BSIP, dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.288.702.000. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat empat sasaran yang ingin dicapai disertai indikator kinerjanya. Selama tahun 2023, terjadi beberapa kali perubahan PK, salah satunya terkait adanya revisi anggaran hingga sembilan kali serta pergantian pemimpin. Target kinerja BPSIP DKI Jakarta berdasarkan PK 2023 yang terakhir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Target capaian kinerja BPSIP Jakarta Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	4
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)	76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)	86

Tabel 4. Program dan anggaran BPSIP Jakarta TA 2023

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	605.200.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp.	605.200.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	194.805.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp.	194.805.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.488.697.000
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp.	1.278.870.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp.	3.209.827.000

III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Pada tahun anggaran 2023, BPSIP DKI Jakarta telah menetapkan empat sasaran strategis untuk dicapai. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan lima indikator kinerja output. Persentase pencapaian target kinerja berdasarkan sasaran strategis tahun 2023 yang diukur dari capaian target output mencapai 88,51 yang dikategorikan ke dalam berkinerja baik

3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023

Berdasarkan PK TA 2023, capaian kinerja BPSIP DKI Jakarta disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Capaian kinerja tahun 2023 BPSIP Jakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	4	4,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)	76	84,44

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)	86	88,51

Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja 1: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian antara lain melalui pameran, *display*/Percontohan penerapan standar instrumen pertanian, lokakarya dan event/pertemuan lainnya; Peningkatan kapasitas penerima diseminasi melalui Forum Pertemuan seperti: bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan pertemuan lainnya; Optimalisasi media cetak, elektronik dan media sosial sangat terkait dengan kegiatan diseminasi lainnya, seperti penyusunan materi penyuluhan, displai, percontohan penerapan, dan forum pertemuan.

Indikator Kinerja 2: Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Pertanian sampai saat ini masih hadir di perkotaan Jakarta. Lahan sawah masih ada untuk membantu penyediaan beras sebagai komoditas utama nasional. Jakarta juga memiliki komoditas unggulan yaitu alpukat Cipedak. Selain itu, usaha-usaha mikro dan kecil (UMK) pengolahan produk hasil pertanian banyak dilakukan di berbagai pelosok wilayah Jakarta. Keberadaan aktivitas dan usaha pertanian tersebut cukup berkontribusi dalam mendukung pengembangan pertanian perkotaan dan terciptanya kemandirian pangan di Jakarta. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan daya saing produk pertanian Jakarta dan menjadikan keberadaannya lebih dikenal dan lebih diterima oleh masyarakat, maka produk-produk tersebut haruslah berkualitas baik dan memenuhi standar yang berlaku. Oleh karena itu, berbagai usaha dan kegiatan untuk lebih mengenalkan program-program pendampingan penerapan standar instrumen pertanian sangat diperlukan sebagai upaya agar lembaga/pelaku/praktisi pertanian di Jakarta menjadi lebih “melek” standar. Dengan alasan tersebut, untuk meningkatkan penerapan standar

bidang pertanian oleh lembaga/petani/kelompok tani/pelaku UMK bidang pertanian di DKI Jakarta maka kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar instrumen pertanian ini dilaksanakan.

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Indikator Kinerja: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)

DKI Jakarta masih memiliki lahan sawah potensial sekitar 400 ha yang masih memproduksi sampai sekarang. Kebutuhan benih padi VUB per musim di Jakarta kurang lebih 9-10 ton untuk seluruh lahan sawah yang ada di Jakarta. Keterbatasan sumber benih menjadi salah satu alasan VUB padi belum banyak dibudidayakan oleh petani. Kegiatan perbenihan padi di DKI Jakarta perlu dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan benih padi tersebut. BPSIP DKI Jakarta bekerja sama dengan instansi terkait berusaha menyediakan benih padi. Tersedianya benih VUB padi yang tersertifikasi di Jakarta akan mendukung terjaganya ketahanan pangan, mempercepat penyebaran benih VUB padi bersertifikat, dapat membantu petani untuk bisa membudidayakannya, dan pada akhirnya akan memudahkan masyarakat mendapatkan beras berkualitas di wilayah Jakarta. Varietas padi yang digunakan dalam kegiatan perbenihan padi ini adalah Inpari 30.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator Kinerja: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)

Tahap-tahap pembangunan Zona Integritas (ZI) terdiri dari Pencanangan ZI dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan

komponen hasil. Komponen Pengungkit diberi bobot 60% dan Komponen Hasil diberi bobot 40%.

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja: Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Kinerja Anggaran ini berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART yang dibuat DJA Kemenkeu. Sehingga pihak yang melakukan pengukuran IKS ini adalah Kemenkeu berdasarkan input rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta pada aplikasi SMART.

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja TA 2023

A. Indikator Kinerja 1: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Indikator kinerja ini diukur melalui capaian jumlah paket standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan pengguna, baik melalui kegiatan strategis maupun kegiatan kerjasama/kemitraan. Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, maka capaian kegiatan ini termasuk berhasil dengan tingkat capaian 100%. Namun demikian, nilai tersebut tidak menggambarkan tingkat penerapan standar maupun tingkat kecepatan penerapan standar oleh pengguna. Untuk melengkapi ketersediaan SNI di BPSIP DKI Jakarta, beberapa SNI telah dibeli dan dimiliki, diantara disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Daftar SNI yang dimiliki BPSIP DKI Jakarta

No	Komoditas	Nomor SNI	Keterangan SNI
1	Alpukat	SNI 01-3168-1992	Apokat
2	Anggur	SNI 8023-2014	Anggur
3	Duku	SNI 6151-2009	Duku
4	Salak	SNI 3167-2009	Salak

5	Sukun	SNI 01-4279-1996	Keripik Sukun
6	Jahe	SNI 3179-2013	Jahe putih besar
7		SNI 01-7084-2005	Simplisia jahe
8		SNI 01-3393-1994	Jahe kering
9	Kencur	SNI 01-7086-2005	Kencuruntuk bahan baku obat
10		SNI 01-7085-2005	Simplisia kencur
11		SNI 01-6994-2004	Kencur (Kaempleria galangal L. segar
12	Kunyit	SNI 7953-2014	Kunyit
13	Krisan	SNI 4478-2014	Krisan potong
14	Kertas dan Karton	SNI 8218-2015	Untuk kemasan pangan

B. Indikator Kinerja: Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Capaian indikator kinerja ini diukur melalui jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Pada tahun 2023, komoditas alpukat cipedak merupakan komoditas target untuk distandardisasi, diantaranya terkait perbenihannya, yaitu menggunakan PTM perbenihan hortikultura. Pendampingan sertifikasi benih alpukat telah terlaksana kepada kelompok tani penangkar benih alpukat “Sejahtera Makmur”, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penangkar telah melakukan sertifikasi benih untuk periode sampai September 2023. Pendampingan SNI Bina UMK telah menghasilkan 3 UMKM yang memperoleh sertifikat SNI Bina UMK, yaitu 1) Leon Kitchen, Jakarta Selatan, 2) Stik kentang Uyunk, Jakarta Timur, dan 3) Dodol Rogayah, Jakarta Timur. Mereka sudah berhak menampilkan logo SNI Bina UMK di kemasan produk yang dihasilkan. Terkait pendampingan produk segar asal tumbuhan (PSAT), tahun 2023 ini, BPSIP DKI Jakarta telah mendampingi kelompok tani New Garden Hydro untuk memulai memperoleh nomor registrasi izin edar PSAT PD-UK, dan poktan ini telah mendapat rekomendasi teknis dari OKKPD Jakarta Selatan untuk mendapatkan nomor registrasi izin edar PSAT PD-UK. Pengujian sampel beberapa produk untuk dibandingkan dengan SNI terkait sudah dilakukan sebagai bahan *gap analysis* untuk ditindaklanjuti di tahun mendatang.

C. Indikator Kinerja 3: Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)

Capaian indikator kinerja ini diukur melalui capaian produksi benih padi terstandar. Kegiatan perbenihan merupakan salah satu kegiatan strategis Kementan, salah satunya untuk menekan laju inflasi yang diakibatkan oleh komoditas pertanian strategis, diantaranya adalah komoditas padi. Target produksi benih padi di DKI Jakarta sebanyak 4 ton. Capaian kegiatan menunjukkan sebanyak 4,5 ton benih padi terstandar telah berhasil diperoleh.

D. Indikator Kinerja 4: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta (Nilai)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pada bulan Desember tahun 2023 telah dilakukan penilaian zona integritas oleh tim assessor BSIP. Target kinerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BPSIP DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 76. Hasil penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas BPSIP DKI Jakarta sebesar 84.44. Hasil penilaian diukur dari beberapa ketersediaan dan kelengkapan dokumen zona integritas BPSIP DKI Jakarta.

E. Indikator Kinerja 5: Nilai kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta DKI (Nilai)

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Nilai Kinerja Anggaran ini berdasarkan PMK 214 tahun 2017

yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART yang dibuat DJA Kemenkeu. Sehingga Pihak yang melakukan pengukuran IKS ini adalah Kemenkeu berdasarkan input rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta pada aplikasi SMART. Nilai kinerja yang diperoleh BPSIP DKI Jakarta pada aplikasi SMART per 15 Januari 2024 yaitu 88,51 dengan kategori baik.

3.1.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Secara umum, target kinerja BPSIP DKI Jakarta tahun anggaran 2023 dapat tercapai dengan berhasil, baik atas dukungan faktor internal maupun eksternal. Secara eksternal, keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, adanya peningkatan respon atas segala umpan balik yang diperoleh, peningkatan kualitas berbagai pelayanan terhadap publik baik layanan kerjasama maupun layanan pengkajian lainnya, serta peningkatan pengelolaan database dan website, sehingga terjalin berbagai kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, baik dengan institusi pemerintah, masyarakat petani maupun akademisi wilayah DKI Jakarta. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja BPSIP DKI Jakarta tahun 2023 antara lain dukungan kerja tim BPSIP DKI Jakarta yang mumpuni, dukungan sarana prasarana serta anggaran yang memadai, dan peningkatan manajemen perencanaan dan monitoring evaluasi secara periodik sehingga fungsi kontrol kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Karena keterbatasan sumberdaya manusia di Subbagian Tata Usaha maka beberapa Pegawai dari Sub Kelompok Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian dan Kelompok Fungsional dilibatkan sebagai Operator Pelaporan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan dan Pemegang Uang Muka Kerja. Hal ini kadang mengakibatkan proses pembukuan dan penatausahaan keuangan, barang milik negara dan persediaan tidak berjalan optimal, namun demikian belum sampai ke tahap terlambat.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan. Selain itu, mulai tahun 2024 Jakarta kemungkinan bukan lagi ibukota negara, dan ini membawa potensi perpindahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20%. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi yang dibutuhkan dalam

skala global. Penerapan Standar di DKI Jakarta diterapkan untuk produk segar dan olahan (UMKM). Adapun kendala pelaku pertanian di Jakarta adalah a) sarana dan prasarana (keterbatasan lahan, kekurangan gudang, dan sarana pasca panen yang masih manual), b) sumber daya manusia (keterbatasan informasi tentang SNI, kurangnya kesadaran, dan administrasi yang lemah), c). produk (masih skala kecil, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta kendala biaya sertifikasi).

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka beberapa hal dapat dilakukan antara lain:

- 1) Jangka Pendek: Sosialisasi penerapan standar di komunitas pertanian, pemetaan mutu komoditas melalui optimalisasi pendampingan dan pelatihan penerapan standar;
- 2) Jangka Menengah: Penyusunan SOP penerapan standar komoditas, fasilitasi promosi dan pemasaran bagi yang menerapkan standar;
- 3) Jangka Panjang: Penerapan SNI pada produk segar dan olahan, memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang menerapkan standar, memberikan insentif kepada pelaku yang menerapkan standar

Strategi yang dilaksanakan BPSIP Jakarta DKI dalam akselerasi diseminasi standar instrumen pertanian kepada target sasaran adalah melalui peningkatan kuantitas dan atau kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi standar instrumen pertanian termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai roda penggerak penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) meningkatkan profesionalismenya dan sikap pengabdian pada bangsa dan negara terutama terkait dengan penerapan standar instrumen pertanian sehingga dapat meningkatkan kualitas produk, baik produk segar maupun produk olahan. Peningkatan kompetensi bagi PNS dilakukan antara lain melalui pelatihan jangka pendek seperti short course, pelatihan teknis, seminar maupun workshop.

3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai UPT BSIP, BPSIP DKI Jakarta tetap berupaya untuk berkontribusi terhadap pengembangan pertanian yang maju, mandiri dan modern, salah satunya melalui peningkatan keterbukaan informasi publik. PPID Kementan sebagai lembaga publik ter-informatif 2023 telah melakukan upaya teknis persiapan sudah dilakukan, komitmen menteri pertanian sangat mendukung pencapaian. Peningkatan internal UK/UPT on going untuk memacu pencapaian seluruh layanan PPID Kementan menuju SEMUA KATEGORI INFORMATIF. Pengembangan

etika karakter terkait keterbukaan informasi di seluruh UK/UPT Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif. Penggunaan media sosial secara masif dan terus menerus sebagai strategi komunikasi. penganugerahan keterbukaan informasi publik. Pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan puncak acara dari tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Publik Kementan, BPSIP Jakarta berhasil menduduki peringkat ke-9 dengan kategori informatif dari 74 PPID pelaksana eselon 3 lingkup Kementan yang mengikuti penganugerahan KIP. Diharapkan seluruh UK/UPT menjadi informatif dan mendukung Kementan mewujudkan informasi yang cepat, tepat, akurat, berkualitas dan terpercaya.

2.6. Akuntabilitas Keuangan

Dalam menjalankan Tupoksinya, pada tahun 2023 BPSIP DKI Jakarta didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN, yang tertera dalam DIPA BPSIP DKI Jakarta nomor SP DIPA-018.09.2.633961/2023 dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.288.702.000,-. Anggaran dimaksud digunakan untuk membiayai program utama Balai yang dilaksanakan yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Program Dukungan Manajemen.

3.2.1. Realisasi Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2023 terdapat revisi anggaran sebanyak 9 kali revisi. Total Ganti Uang Persediaan sebanyak 33 kali dan penggunaan TUP Tunai satu kali sebesar 199.860.000. Realisasi Keuangan per 28 Desember 2023 sebesar Rp. 5,086,685,387 (96,18%) yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2,287,930,274 (98,46%), Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 2,698,755,113 (94,20%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 100.000.000 (100 %).

Dari tabel penggunaan dana APBN di atas, tingkat serapan anggaran BPSIP DKI Jakarta mencapai 96,18%. Tingginya serapan anggaran merupakan salah satu indikator dari adanya perencanaan yang baik, di dukung oleh adanya monitoring pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang cukup sehingga realisasi fisik maupun keuangan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

3.2.2. Pengelolaan PNB

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.947.700 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berasal dari Penjualan Benih padi sebanyak 1.000 Kg. Tidak terdapat realisasi penggunaan PNB pada Tahun 2023.

Tidak terdapat realisasi penggunaan PNB pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh karena penerimaan fungsional yang bersumber dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya jumlahnya cukup kecil, yaitu Rp. 1.000.000. Sedangkan Pagu Penggunaan PNB hanya sebesar 88,10 persen dari Penerimaan Fungsional.

3.2.3. Hibah Langsung Luar Negeri

Pada tahun anggaran 2023, BPSIP DKI Jakarta tidak memperoleh hibah luar negeri langsung, baik dalam bentuk barang maupun uang.

III. Penutup

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Kepala BPSIP DKI Jakarta menetapkan target kinerja tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPSIP Jakarta kepada Kepala BSIP. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Kepala BPSIP Jakarta menetapkan empat sasaran yang harus tercapai yaitu 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, 2) meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, serta 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Jumlah total pagu anggaran tahun 2023 yang diperoleh untuk melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Program Dukungan Manajemen yaitu sebesar Rp. 5.288.702.000.

Indikator kinerja dari sasaran pertama antara lain: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan capaian 1 SNI; dan 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan capaian 1 Lembaga. Indikator kinerja dari sasaran kedua yaitu Jumlah produksi standar instrumen terstandar yang dihasilkan dengan capaian 4,5 Unit dari nilai yang ditargetkan sebesar 4 Unit. Indikator kinerja dari sasaran ketiga adalah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta dengan capaian nilai 84.44 melebihi dari target nilai 76.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2023, maka secara keseluruhan capaian fisik kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Jakarta pada tahun anggaran 2023 telah cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Hingga saat ini, BPSIP DKI Jakarta telah menjalani tugas fungsinya untuk *melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi*. Dalam pelaksanaan kegiatan, terkadang ditemui kendala yang bersifat teknis di lapangan, namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi sehingga tidak sampai mengakibatkan kegagalan. Dalam upaya meningkatkan daya guna hasil kegiatan, BPSIP DKI Jakarta juga terus meningkatkan jalinan kerjasama

dengan berbagai pihak, dalam rangka akselerasi penerapan dan penyebaran *standar instrumen pertanian spesifik lokasi*.

Permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi di DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta bukan merupakan daerah produsen karena keterbatasan lahan. Selain itu, mulai tahun 2024 Jakarta kemungkinan bukan lagi ibukota negara, dan ini membawa potensi perpindahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20%. Meskipun demikian, tantangan Jakarta adalah mempertahankan posisinya sebagai kota global. Fokus utama adalah pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian untuk memenuhi standar tinggi yang dibutuhkan dalam skala global. Penerapan Standar di DKI Jakarta diterapkan untuk produk segar dan olahan (UMKM). Adapun kendala pelaku pertanian di Jakarta adalah a) sarana dan prasarana (keterbatasan lahan, kekurangan gudang, dan sarana pasca panen yang masih manual), b) sumber daya manusia (keterbatasan informasi tentang SNI, kurangnya kesadaran, dan administrasi yang lemah), c). produk (masih skala kecil, kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, serta kendala biaya sertifikasi).

Seiring dengan perkembangan persaingan pasar global, BPSIP DKI Jakarta sebagai unit fungsional BSIP di daerah, akan terus melaksanakan kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan para stakeholder, untuk meningkatkan mutu produk dan daya saingnya di pasar global.

Lampiran

Lampiran 1. Penetapan Kinerja BPSIP Jakarta TA 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA
JALAN RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020
WEBSITE: jskarta.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: balp.jakarta@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alwi Mustaha

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 November 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Muhammad Alwi Mustaha

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI
JAKARTA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	4
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta (Nilai)	76
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta (Nilai)	86

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	605.200.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp.	605.200.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	194.805.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp.	194.805.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.488.697.000
3	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp.	1.278.870.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp.	3.209.827.000

Pihak Kedua

Jakarta, 27 November 2023
Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Muhammad Alwi Mustaha

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA.2023

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Sasaran
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	4
TOTAL			UNIT	4